

BAB I PENDAHULUAN

Alasan saya tertarik untuk menulis tema tentang konflik di Timur Tengah dengan judul “**KEPENTINGAN EKONOMI DAN KEAMANAN CHINA DALAM KEBIJAKAN NEW SILK ROAD TAHUN 2008 - 2013**” dikarenakan Kebijakan *new silk road* merupakan agenda ambisius China dalam mewujudkan kejayaan negara ini pada masa lalu, ketika negara ini berhasil menguasai jalur perdagangan internasional, baik darat ataupun perairan antar negara. Kebijakan ini menjadi keputusan yang memiliki legitimasi ketika pemerintah China berhasil mentransformasikan *new silk road*, baik pada masa kepemimpinan Hu Jintao hingga X Jinping. Karena hal tersebutlah, maka saya tertarik untuk membahasnya pada skripsi saya kali ini.

A. Latar Belakang Masalah

China merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami tingkat pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat. Kemajuan perekonomian tersebut tidak lepas dari aspek sosio-historis dan tingkat peradaban (*civilization*) negara ini yang memang telah maju sebelum periode masehi. Pasca sejarah perekonomian, pada tahun 1978 kondisi perekonomian Cina mengalami perubahan secara fundamental akibat program reformasi yang dijalankan oleh figur pembaharu Cina, Deng Xiaoping.¹

China **merupakan** negara yang terletak di Wilayah Asia yang berbatasan dengan 14 negara sekaligus karena luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara ini. Keempat belas negara ini adalah Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakstan, Kirgisia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam. Dalam sepanjang sejarahnya, China telah melalui berbagai perjalanan yang panjang, termasuk ketika

¹ Ezra F. Vogel, 2013, *Deng Xiaoping and Transformation of China*, Belknap Press of Harvard University, New York, hal.29.

bangsa ini berhasil mengembangkan perdagangan lintas wilayah yang dikenal dengan silk road atau jalur sutera.²

Silk road adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang'an, China, dengan Antiokhia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya terbawa sampai ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk pengembangan kebudayaan China, India dan Roma namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah 'jalur sutra' pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan dari China yang banyak berupa sutra.³

Jalur Sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan begitu dia meluas dari pusat perdagangan China Utara dan China Selatan, rute utara melewati Bulgar-Kypchak ke Eropa Timur dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia; rute selatan melewati Turkestan-Khorasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antiokhia di Selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara.⁴

Melalui serangkaian sejarah yang panjang China menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami tingkat kemajuan perekonomian pada taraf yang sangat pesat atau yang dikenal dengan "*miracle of economic growth*". Kemajuan perekonomian ini tidak lepas dari peran Deng Xiaoping sebagai figur reforma perekonomian Cina yang menjalankan program reformasi pada tahun 1989, dimana program ini berhasil merubah orientasi ekonomi-politik China, yang semula bercorak dogmatis menjadi

² "Country Profile China", dalam <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/China.pdf>, diakses pada tanggal 18 April 2017.

³ "History of China Silk Road : Development, Significance and Travelers", dalam <https://www.travelchinaguide.com/silk-road/history/>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

⁴ *Ibid.*

pragmatis dan terbuka.⁵ Dalam programnya Deng Xiaoping menekankan orientasi perkembangan China dengan mengedepankan empat hal yaitu modernisasi sektor pertanian, industri, ilmu pengetahuan (*sains*) dan teknologi.

Perkembangan perekonomian China pada periode tahun 1978-2004 memang mengalami tingkat progresifitas yang luar biasa. Periode tersebut China telah berhasil menjadikan China sebagai negara adikuasa baru di Asia, bahkan di dunia. Tingkat GDP (*gross domestic product*) sebagai indikator kemajuan suatu negara dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat, sebagai gambaran pada tahun 1980 tingkat GDP Cina hanya sebesar 460.906 US Dollar, kemudian pada tahun 1985 meningkat tajam sebesar 896.440 US Dollar, pada tahun 1990 sebesar 1.854.790 US Dollar, tahun 1995 sebesar 6.079.400 US Dollar, tahun 2000 sebesar 9.921.500 US Dolar dan pada awal tahun 2005 sebesar 18.308.500 US Dollar.⁶

Kemajuan perekonomian China tersebut ditopang oleh sektor pertanian (agrikultur) sebesar 11,7 persen, industri sebesar 48,9 persen, pelayanan jasa sebesar 39,3 persen dan sektor-sektor minoritas lainnya sebesar 5,5 persen. Kemajuan perekonomian China tersebut akhirnya membawa negara ini ke swasembada di berbagai bidang, bahkan hingga pada tahun 2005 China tidak lagi tergantung pada hutang luar negeri sebagai modal pembangunan.⁷

Kemajuan perekonomian China pada periode tahun 1978-2004 tidak lepas dari program refomasi negara yang menitik-beratkan pada upaya untuk membuka diri dari pergaulan

⁵ Dogmatis adalah sebuah pendekatan atau keyakinan yang dijalankan berdasarkan pada dogma (doktrin) yaitu sebuah dalil atau azas yang harus dipercayai begitu saja, sedangkan pragmatis adalah sebuah tindakan yang berorientasi pada kepraktisan tanpa mengurangi esensi dari tujuan-tujuannya. BN. Marbun, 2005, *Kamus Politik : Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.139 dan 450.

⁶ "China GDP annual Growth Rate", dalam <http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

⁷ *Ibid.*

internasional (*open door policy*) atau yang disebut sebagai “*gaige kaifang*” (reformasi dan membuka diri). Pasca program reformasi bidang perekonomian tersebut, tingkat pertumbuhan GDP (*gross domestic product*) negara ini semakin mengalami peningkatan secara gradual.

Kemajuan perekonomian yang dicapai China, tidak lepas dari sumbangan industri-industri yang memproduksi barang-barang secara massal, yang berorientasi pada kemandirian masyarakat yang bekerja pada industri-industri yang menjadi bagian dari investasi asing di negara ini. Nilai inflasi pada perekonomian makro China juga berjalan terkendali dengan rata-rata kurang dari tiga persen pertahun.

Berkembangnya perekonomian China dan sejarah masa lalu kemudian mendorong pemerintahan China di bawah kepemimpinan Hu Jintao untuk kembali mengembangkan kebijakan *silk road* yang dikenal dengan *new silk road*.⁸ Seperti pada kebijakan sebelumnya, *new silk road* yang menjadi tolok ukur perjuangan China untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi-politik. Kebijakan ini diawali dengan membangun jalan trans wilayah yang dikenal dengan *Trans Euroasia Logistic* yang menghubungkan China, yaitu wilayah Urumqi dengan beberapa negara Asia Tengah, diantaranya Kazakhstan, Mongolia hingga Rusia.⁹

Kemudian kebijakan *new silk road* bertransformasi pada rezim selanjutnya yaitu ketika China berada pada masa kepemimpinan Xi Jinping. Diperkirakan di tahun 2013 total anggaran yang disiapkan dalam mendukung *new silk road* sebesar

⁸ Silk road atau jalur sutera merupakan jalur atau rute perdagangan bangsa China pada masa lalu sekitar abad 200 SM hingga mencapai wilayah Eropa, sedangkan *new silk road* merupakan gagasan atau cita-cita stakeholder China untuk mengembalikan jalur perdagangan melalewati berbagai negara dunia pada masa Hu Jintao hingga xi Jinping.

⁹ “Hauling New Treasure Along the Silk Road”, dalam <http://www.nytimes.com/2013/07/21/business/global/hauling-new-treasure-along-the-silk-road.html?pagewanted=all&ref=general&src=me&r=0>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

8 triliun US Dollar. Pada fase pertama pemerintah China berhasil membangun *Belt and Road Initiative* (BRI), yaitu usaha China untuk membuka kembali jalur perdagangan dan ekonomi internasional dengan melewati beberapa koridor diantaranya New Eurasia Land Bridge yang melewati Rusia, Mongolia, Bangladesh, hingga Turki dan Mesir.¹⁰

Keberadaan Rusia memiliki peranan penting bagi China dalam pengembangan *new silk road*. Kedua negara berpengaruh di wilayah Asia dan dunia sebagai hak veto dalam Dewan Keamanan PBB tersebut ini berhasil membangun berbagai kerjasama pengembangan infrastruktur yang diawali dengan berbagai pertemuan tingkat menteri dan kepala negara, seperti halnya kunjungan Presiden Xi Jinping ke Moskow pada Mei 2014 yang berhasil bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, antara China dan Rusia sepakat untuk mengembangkan kerjasama bidang energi, perdagangan hingga pertahanan, termasuk kerjasama pengembangan teknologi nuklir.¹¹

Implementasi BRI sebagai tolok ukur *new silk road* juga menjadi pengembangan investasi. Hal ini dapat dilihat dari ditanamkannya investasi China di Rusia untuk membiayai 3 proyek utama, yaitu pembangunan infrastruktur, pengembangan energi dan jasa sebesar 879 milyar US Dollar. Kemudian di Turki, China juga mengalokasikan anggaran sebesar 18,8 milyar US Dollar untuk pengembangan sektor manufaktur, perdagangan dan infrastruktur jala raya trans di wilayah Turki Timur.¹²

Investasi China lainnya juga dijalankan kepada beberapa negara Afrika yang juga menjadi agenda *new silk road*, diantaranya pembangunan jalan trans dan pelabuhan di pantai

¹⁰ “One Belt, One Road”, dalam http://www.cbbc.org/cbbc/media/cbbc_media/One-Belt-One-Road-main-body.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

¹¹ “Hadapi Poros China-Rusia, Amerika Serikat Bingung”, <http://www.dw.com/id/hadapi-poros-rusia-cina-amerika-bingung/a-17650921>, diakses pada tanggal 8 Juni 2017.

¹² *Ibid.*

timur Kenya. Kerjasama ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2018 dengan menghabiskan total anggaran sekitar 218,6 juta US Dollar. Pengembangan infrastruktur ini nantinya akan menjadi the *port of far abroad* yang akan dimanfaatkan bersama-sama antara negara-negara Afrika, termasuk China.¹³

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa China memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan *New Silk Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinnping tahun 2008-2013 ?”

C. Kerangka Teori

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicitacitakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”.

Hans J. Morgenthau - menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan;

Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan cultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin

¹³ “China Berhasil Bangun Pelabuhan di Kenya”, *Kompas*, 8 Agustus 2016.

suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.¹⁴

Kepentingan adalah suatu hal yang ingin dicapai, sedangkan kepentingan nasional (*National Interest*) adalah kepentingan negara yang dijalankan oleh pembuat keputusan (*Decisions Maker*) terhadap negara lain dalam rangka merealisasikan agenda-agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Kepentingan nasional terbagi atas dua kategori yaitu kepentingan praktis (jangka pendek) dan kepentingan kontinuitas (jangka penjang/berlanjut).

Kepentingan nasional (*National Interest*), dalam konteks kepentingan jangka pendek/kepentingan praktis merupakan kebutuhan kepentingan suatu negara yang mendesak yang berhubungan dengan eksistensi kehidupannya dan bersifat seketika (instans), sedangkan kepentingan jangka panjang (kepentingan kontinuitas) merupakan kepentingan nasional yang diperoleh atas kontak dengan negara lain yang bersifat berkelanjutan (*kontinyu*). Hal ini sesuai dengan pendapat Benyamin Jowet yang mengungkapkan bahwa :

“The State come into exintence originating in the bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life”. (negara mendapatkan eksistensinya berdasarkan pada kebutuhan hidup yang mendesak dan kemudian tetap diperlukan keberadaanya untuk membina kehidupan yang lebih baik).¹⁵

Sedang menurut Donald E Nuechterlin menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional menjadi 4 jenis yaitu;¹⁶

¹⁴ A. Coulumbis, Theodore dan H. Wolfe, James. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abardin. Hlmm 115

¹⁵ Benyamin Jowett, 2003, *The Modern Library* dalam May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik:Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Refika Aditama, Bandung, hal 64

¹⁶ Rudy, D. T. (2000). *Studi Strategis Dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hlmm 62

1. Kepentingan pertahanan yang diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi yang menyangkut kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional yang mana kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi yang berkaitan dengan ideologi atau pandangan hidup (*way of life*).

Keamanan dan ekonomi merupakan Perwujudan dari kepentingan nasional, sehingga antara keamanan dan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Ekonomi dan keamanan yang dijalankan melalui kontak dengan negara lain harus dijalankan melalui mekanisme rencana yang komperhensif (berketindak-lanjutan) yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan kontak dengan negara lain. Sehingga kepentingan nasional merupakan hal yang berpengaruh kuat terhadap eksistensi suatu bangsa.

Dari paparan teori kepentingan di atas maka pendekatan ini dapat diaplikasikan tentang alasan China memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan *New Silk Road*, dimana ini merupakan *output* dari inisiatif China yang telah memiliki legitimasi baik dari pihak eksekutif yaitu pemerintahan dimasa Xi Jinping dan Hu Jintao, legislatif yaitu *National People Congrres* dan politburo lainnya. Jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E Nuechterlin maka *new silk road* merupakan kebijakan China yang sangat tepat, dimana sebelumnya ketika China masih berada pada sistem kekaisaran, silk road berhasil memberikan berbagai keuntungan secara ekonomi dan politik, terhadap kerajaan ataupun para saudagar pada masa itu.

Sejarah tentang kejayaan pada masa lalu China menjadi motivasi yang begitu kuat bagi pemerintah China dan para stakeholder lainnya memperluas hegemoni ekonomi dan politik melalui new silk road. Agenda ini merupakan agenda nasional

yang berupaya dikembangkan oleh pemerintah China bersama dengan stakeholder lainnya untuk dapat menjangkau ke tiga wilayah (continent area) baik Asia, Afrika dan Eropa. Awalnya silk road dikembangkan di wilayah dalam negeri untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kemudian menjangkau ke negara-negara yang berbatasan secara langsung dengan China, diantaranya Kazakhstan, India, Pakistan, Rusia dan beberapa wilayah lainnya. Kemudian orientasi yang terakhir adalah menjangkau wilayah/negara yang paling jauh, diantaranya Rotterdam-Belanda, Venice-Italia dan beberapa wilayah lain. Dengan penguatan jalur laut yang sudah ada sejak dulu dan pembangunan jalur darat yang sedang di kerjakan, guna mempercepat pembangunan baik darat dan laut sehingga dapat meningkatkan percepatan transportasi yang berimbas pada percepatan kegiatan perekonomian yang dilalui jalur New Silk Road.

Kemudian berkaitan dengan alasan China dalam menerapkan kebijakan *new silk road* adalah sebagai bagian dari strategi/perspektif incremental, dimana pada masa lalu China berhasil memperoleh berbagai keuntungan dengan terjalannya hubungan baik antara China dan negara-negara yang dilaluinya, diantaranya Rusia, Eropa, Asia hingga Afrika. Upaya ini nantinya dapat menjadi tolok ukur kepentingan nasional yang dapat memberikan keuntungan bagi China, khususnya dalam aspek ekonomi dan keamanan pada jangka panjang (*continuing interest*), sehingga China bersedia untuk mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk di investasikan di negara-negara yang menjadi obyek pengembangan *new silk road*.

Kemudian alasan China dibalik kebijakan *new silk road* adalah sebagai strategi/perspektif rasional, dimana negara ini memerlukan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien berkaitan dengan luasnya geografis, jumlah penduduk yang besar dan faktor-faktor lainnya, sehingga ini dipandang akan mengganggu stabilitas keamanan dan menimbulkan potensi dis-integrasi, khususnya di wilayah perbatasan, diantaranya Xinjiang, Lasha, Tibet dan beberapa wilayah lainnya. Selain itu, kesenjangan pembangunan juga menyebabkan munculnya persoalan terorisme,

dimana pada wilayah-wilayah ini memang cenderung mengalami ketertinggalan pembangunan (*development ladge*) sehingga bukan saja akan menyebabkan kegagalan pemerataan pembangunan, namun juga memicu gangguan keamanan hingga pemberontakan.

D. Hipotesa

Faktor yang menjadi alasan China memutuskan untuk mengembangkan kembali *new silk road Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinping tahun 2008-2013 adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional China, yakni :

1. Kepentingan bidang ekonomi yang berkaitan dengan upaya untuk membangun hubungan dengan negara/wilayah lain, yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam jangka panjang dengan negara-negara yang dilalui *new silk road* di Eropa, Asia hingga Afrika.
2. Kepentingan bidang politik dan keamanan yang berkaitan dengan upaya China untuk melindungi , yaitu sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi disintegrasi wilayah rural berkaitan dengan berkembangnya isu terorisme dan disintegrasi melalui pembangunan infrastruktur penghubung, diantaranya Xinjiang dan Tibet.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis penggunaan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal.12.

melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :¹⁸

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*web site*)

3. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara nyata dan perkembangan tentang kepentingan China dibalik kebijakan *New Silk Road* yang dijalankan pada periode 2008-2013.¹⁹

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang alasan China memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan nasional *New Silk Road*. *Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinping tahun 2008-2013.
2. Untuk mengetahui tentang berkembangnya dinamika hubungan luar negeri China, serta perkembangan ekonomi-politik dan liberalisasi kerjasama internasional China, khususnya pada periode tahun 2008-2013.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tahun

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), 1994, *Qualitative Methods in Organizational Research*, London : Sage Publications, hal.3-4.

2008-2013. Dilipih tahun 2008 karena menjadi momentum penting bagi presiden Hu Jintao untuk mengimplementasikan kebijakan *new silk road* melalui pembukaan jalur transportasi dari China (Xinjinag) ke negara-negara Asia Tengah. Sedangkan tahun 2013 dipilih karena merupakan periode yang menunjukkan kemajuan dari program ini, sekaligus sebaga transformasi kebijakan *new silk road* bagi kepemimpinan China dari kepemimpinan Hu Jintao ke Xi Jinping . Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dengan konten latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, hipotesis, metode penelitian tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang sejarah silk road dan perkembangan *new silk road*.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang alasan bidang ekonomi, China dalam memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan nasional *New Silk Road* yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara yang dilalui new silk road di Eropa, Asia hingga Afrika.

BAB IV merupakan bab yang membahas tentang alasan politik dan keamanan China memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan nasional *New Silk Road Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinnping tahun 2008-2013 yaitu sebagai upaya prefentif dalam mengantisipasi disintegrasi wilayah rural dan isu terorisme melalui pembangunan infrastruktur penghubung, diantaranya Xinjiang dan Tibet.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.